

**DETERMINAN MANIPULASI AKRUAL DALAM PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :
Munasifah
NIM: 31402400040**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

**DETERMINAN MANIPULASI AKRUAL DALAM PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :
Munasifah
NIM: 31402400040**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**


SKRIPSI

**DETERMINAN MANIPULASI AKRUAL DALAM
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Disusun Oleh :
Munasifah
NIM : 31402400040**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 19 Agustus 2025
Dosen Pembimbing,


Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211414026

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**DETERMINAN MANIPULASI AKRUAL DALAM PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Disusun Oleh :

Munasifah

NIM : 31402400040

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan
selanjutnya dapat diajukan kepada Ketua Program
Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 21 Agustus 2025

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing,



Provita Widayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., PhD
NIK. 211403012

Hani Werdi Aprivanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211414026

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munasifah
NIM : 31402400040
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul:

**“DETERMINAN MANIPULASI AKRUAL DALAM PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”.**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 21 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Munasifah
NIM. 31402400040

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik yang berjudul **“Determinan Manipulasi Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”**. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi Skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hambanya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
6. Kepada Bapak, Ibu selaku orangtua saya serta keluarga besar yang telah memberikan do'a, support baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Terima kasih untuk teman-teman S-1 Akuntansi 2024 yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Agustus 2025

Penulis,



Munasifah

NIM. 31402400040

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN..... | 1 |
| 1.2 RUMUSAN MASALAH..... | 6 |
| 1.3 PERTANYAAN PENELITIAN..... | 7 |
| 1.4 TUJUAN PENELITIAN..... | 8 |
| 1.5 MANFAAT PENELITIAN..... | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 LANDASAN TEORI..... | 10 |
| 2.1.1 <i>Agency Theory</i> | 10 |
| 2.1.2 Manipulasi AkruaI Pemerintah Daerah | 11 |
| 2.1.3 <i>Government Size</i> | 13 |
| 2.1.4 Kapasitas Fiskal | 14 |
| 2.1.5 <i>Fiscal Distress</i> | 15 |
| 2.1.6 <i>Legislature Size</i> | 16 |
| 2.2 PENELITIAN TERDAHULU | 17 |
| 2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS | 24 |
| 2.3.1 Pengaruh <i>Government Size</i> terhadap Manipulasi AkruaI dalam Pelaporan Keuangan Daerah | 24 |
| 2.3.2 Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Manipulasi AkruaI dalam Pelaporan Keuangan Daerah | 25 |
| 2.3.3 Pengaruh <i>Fiscal Distress</i> terhadap Manipulasi AkruaI dalam Pelaporan Keuangan Daerah | 26 |
| 2.3.4 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Manipulasi AkruaI dalam Pelaporan Keuangan Daerah | 27 |

| | |
|--|----|
| 2.4 KERANGKA KONSEPTUAL..... | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| 3.1 JENIS PENELITIAN..... | 30 |
| 3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN | 31 |
| 3.2.1 Populasi Penelitian..... | 31 |
| 3.2.2 Sampel Penelitian..... | 31 |
| 3.3 SUMBER DAN JENIS DATA | 31 |
| 3.4 METODE PENGUMPULAN DATA | 31 |
| 3.5 DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR..... | 32 |
| 3.5.1 Variabel Independen | 32 |
| 3.5.2 Variabel Dependen | 32 |
| 3.6 METODE ANALISIS DATA..... | 33 |
| 3.6.1 Analisis Deskriptif..... | 33 |
| 3.6.2 Uji Normalitas | 34 |
| 3.6.3 Uji Multikolinearitas | 34 |
| 3.6.4 Uji Heterokedastisitas..... | 35 |
| 3.6.5 Analisis Koefisien Determinasi | 35 |
| 3.6.6 Analisis Regresi Linear Berganda..... | 36 |
| 3.6.7 Uji t..... | 37 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 38 |
| 4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 38 |
| 4.1.1 Sejarah Singkat Provinsi Jawa Tengah | 38 |
| 4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah..... | 39 |
| 4.1.3 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah..... | 40 |
| 4.1.4 Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah | 42 |
| 4.2 HASIL PENELITIAN..... | 45 |
| 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif | 45 |
| 4.2.2 Uji Asumsi Klasik | 48 |
| 4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda | 51 |
| 4.3 PEMBAHASAN | 55 |
| 4.3.1 Pengaruh <i>government size</i> terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah..... | 55 |
| 4.3.2 Pengaruh kapasitas fiskal terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah..... | 56 |

| | |
|---|----|
| 4.3.3 Pengaruh <i>fiscal distress</i> terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah..... | 58 |
| 4.3.4 Pengaruh <i>legislature size</i> terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah..... | 59 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 61 |
| 5.1 Kesimpulan | 61 |
| 5.2 Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN..... | 68 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu | 18 |
| Tabel 3.1 Variabel dan Indikator | 32 |
| Tabel 4.1 Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah..... | 41 |
| Tabel 4.2 Tabel Demografi Provinsi Jawa Tengah 2024..... | 43 |
| Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif..... | 45 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas | 49 |
| Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas | 49 |
| Tabel 4.6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi..... | 51 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji t..... | 53 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Penelitian Determinan Manipulasi Akrua! Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah..... | 29 |
| Gambar 4.1 | Peta Provinsi Jawa Tengah | 40 |
| Gambar 4.2 | Hasil Uji Heterokedastisitas..... | 50 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Tabulasi Data Penelitian..... | 68 |
| Lampiran 2. Hasil Analisis Data Penelitian | 81 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Basis akrual adalah metode akuntansi yang mencatat pendapatan dan beban pada saat transaksi atau peristiwa ekonomi terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Dalam basis ini, pendapatan diakui ketika barang atau jasa diserahkan kepada pengguna, meskipun pembayaran belum diterima, dan beban dicatat saat kewajiban membayar timbul, walaupun pembayaran belum dilakukan (Gamayuni, 2022). Pendekatan ini memungkinkan pencatatan yang lebih akurat dan lengkap mengenai kondisi keuangan dan kinerja entitas dalam suatu periode, karena mencerminkan hak dan kewajiban yang sebenarnya tanpa bergantung pada arus kas (Pilcher, 2011). Basis akrual juga mendukung prinsip pencocokan (*matching principle*) antara pendapatan dan biaya terkait, sehingga laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih realistis dan berguna untuk pengambilan keputusan (Rohman, 2016).

Di Indonesia sendiri, perkembangan basis akrual berlangsung secara bertahap dan sistematis, dimulai dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip akuntansi berbasis akrual (Thusa'dia et al., 2025). Namun, implementasinya tidak dilakukan secara langsung. Pemerintah awalnya menerapkan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), di mana pengakuan pendapatan dan belanja masih berbasis kas, sementara pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas sudah berbasis akrual. Pendekatan ini digunakan sebagai masa transisi untuk menyesuaikan kesiapan perangkat dan sumber daya di seluruh tingkatan pemerintahan (Gamayuni, 2022).

Selanjutnya, penerapan penuh basis akrual diwajibkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintah harus menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan mulai tahun anggaran 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Pemerintah daerah juga diatur untuk menerapkan SAP berbasis akrual melalui Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan tenggat waktu implementasi paling lambat tahun 2015.

Pemberlakuan SAP berbasis akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tentu diharapkan dapat memberikan output lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan serta kinerja pemerintah daerah. Namun nyatanya, pemberlakuan basis akrual ini tidak serta merta menghasilkan LKPD yang berkualitas. Banyak pihak yang kemudian terlibat dalam fenomena manipulasi akrual berkat celah yang diberikan dari basis akrual ini. Manipulasi akrual adalah praktik penyesuaian atau perubahan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi

evaluasi kinerja keuangan dan kualitas pelaporan, serta untuk mengelola surplus atau defisit agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya (Anessi-Pessina & Sicilia, 2019). Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, manipulasi akrual terjadi karena adanya kebebasan dalam menggunakan diskresi akrual, yaitu kebijakan akuntansi yang memberikan ruang bagi pengelola keuangan untuk melakukan estimasi atau penilaian yang tidak objektif terhadap aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran (Adnan et al., 2023).

Beberapa contoh manipulasi akrual ini pernah terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Pertama, terjadi pada sisi pemerintah Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2002-2015 yang mengakibatkan LKPD Kabupaten Tegal elalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan sekali saja di tahun 2008 Disclaimer, dimana auditor BPK menolak memberikan pendapat. Dikutip dari Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah (2018), masalah utama yang mengakibatkan hal tersebut adalah keberadaan serta nilai aset sebesar Rp 49 Miliar pada LKPD yang tidak sesuai dengan keadaan fisik aset di lapangan. Meskipun pada 2017 berhasil meraih WTP atas LKPD-nya, pemerintah Kabupateb Tegal mengaku bahwa masih ada ketidaksesuaian sebesar Rp 6 Miliar yang masih mereka cari dan evaluasi saat itu.

Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (2023) menemukan beberapa permasalahan pada LKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Pertama, Realisasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa belum didukung laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan. Kedua, Penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

(SMKN) tidak sesuai dengan tata kelola keuangan daerah. Ketiga, terdapat ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, kekurangan volume dan pengenaan denda keterlambatan atas kontrak pekerjaan belanja modal pada 6 organisasi perangkat daerah (OPD). Temuan BPK ini menunjukkan bahwa meskipun meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), LKPD suatu daerah belum tentu terbebas dari hal-hal seperti manipulasi akrual.

Praktik manipulasi akrual sendiri sulit dideteksi dan sering digunakan untuk menyamarkan kondisi fiskal yang sebenarnya, misalnya untuk menghindari defisit anggaran atau meningkatkan citra kinerja keuangan pemerintah daerah agar memperoleh insentif atau penghargaan dari pemerintah pusat seperti Opini WTP yang telah dicontohkan di atas (Shafira & Abdullah, 2022). Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan adanya asimetri informasi dalam hubungan antara prinsipal (pemerintah pusat seperti BPK) dengan pemerintah daerah selaku agen. Konflik kepentingan yang timbul dari perbedaan tujuan antara pemerintah pusat selaku dengan pemerintah daerah menjadi pendorong utama terjadinya manipulasi akrual, di mana agen dapat menggunakan diskresi akuntansi untuk menyamarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, misalnya dengan mengatur waktu pengakuan pendapatan atau beban agar laporan keuangan tampak lebih baik dari kenyataan (Pina et al., 2012).

Manipulasi akrual sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, empat diantaranya yaitu *government size*, kapasitas fiskal, *fiscal distress*, serta *legislature size*. Handayani et al. (2022) mendefinisikan *government size* sebagai ukuran dari suatu Pemda yang menggambarkan beban pelayanan publik, lingkup

pelayanan publik, besaran anggaran, dan besaran kekayaan yang dimiliki. Lebih lanjut, Handayani et al. (2022) dalam risetnya tersebut mengungkapkan bahwa *government size* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual. Temuan tersebut sejalan dengan Adnan et al. (2023) serta Uttunggadewi et al. (2024) yang juga mengungkapkan hal yang sama. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Putri et al. (2023) serta Tampubolon et al. (2023) bahwa *government size* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual. Faktor selanjutnya terkait dengan kapasitas fiskal yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban belanjanya. Variabel ini diukur dengan angka selisih antara total pendapatan daerah dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan untuk belanja tertentu (Handayani et al., 2022). Adapun penelitian terkait dengan variabel ini seperti Adnan et al. (2023), Uttunggadewi et al. (2024), serta Putri et al. (2023) secara keseluruhan menemukan hasil yang sama yakni kapasitas fiskal berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual pada pemerintah daerah.

Kemudian untuk variabel *fiscal distress*, Tampubolon et al. (2023) serta Uttunggadewi et al. (2024), menemukan adanya pengaruh positif yang diberikan terhadap manipulasi akrual. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, Adnan et al. (2023) maupun Handayani et al. (2022) justru mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh negatif *fiscal distress* terhadap manipulasi akrual. *Fiscal distress* ini sendiri merupakan penurunan sumber daya daerah (aset bersih) yang signifikan, sehingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban atau belanjanya. Sementara itu, *legislature size* yang mencerminkan beban politik

dalam penganggaran dan akuntabilitas di daerah, dimana semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin besar pula kepentingan konstituen yang harus diperjuangkan untuk diakomodasi dalam APBD dianggap berpengaruh positif oleh Adnan et al. (2023) dan Handayani et al. (2022) tanpa adanya penelitian lain dengan temuan berbeda terhadap manipulasi akrual pada pemerintah daerah.

Merujuk pada apa yang telah diuraikan mengenai pengaruh *government size*, kapasitas fiskal, *fiscal distress*, serta *legislature size* terhadap manipulasi akrual, dapat dipahami masih terdapat beberapa *gap* yang menimbulkan perbedaan hasil penelitian. Hal inilah yang kemudian memotivasi peneliti untuk meneliti kembali pengaruh *government size*, kapasitas fiskal, *fiscal distress*, dan *legislature size* terhadap Manipulasi Akrual Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian dituangkan dalam penelitian berjudul **“Determinan Manipulasi Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Instansi pemerintah wajib membuat laporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu maksud dari pelaporan keuangan yang utama pada pemerintah daerah diantaranya untuk memberikan sebuah informasi mengenai status dan kondisi finansial. Peraturan kepala daerah memungkinkan terjadinya fleksibilitas penyajian laporan keuangan dalam hal besaran angka-angka dalam sajian LKPD. Hal itu menyebabkan terbukanya peluang untuk melakukan manajemen akrual atau manipulasi akrual.

Berkaitan dengan manipulasi akrual, beberapa penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti *government size*, kapasitas fiskal, dan *fiscal distress* namun belum banyak yang mengkaitkan dengan aspek pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan oleh anggota lembaga perwakilan (*legislature size*) yang memiliki kepentingan politik sekaligus sebagai perpanjangan tangan publik di pemerintahan daerah. Selain itu, belum ditemukan juga penelitian yang mengaitkan fenomena manipulasi akrual dengan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Merujuk pada urgensi tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana pengaruh peran *government size*, kapasitas fiskal, *fiscal distress*, dan *legislature size* terhadap manipulasi akrual Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah *government size* berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah kapasitas fiskal berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah *fiscal distress* berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah *legislature size* berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *government size* terhadap Manipulasi Akrua! Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kapasitas fiskal terhadap Manipulasi Akrua! Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *fiscal distress* terhadap Manipulasi Akrua! Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menguji dan menganalisis *legislature size* terhadap Manipulasi Akrua! Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendapat *point of view* baru berdasarkan penelitian Handayani et al. (2022) serta Adnan et al. (2023) yang juga meneliti pengaruh *government size*, kapasitas fiskal, *fiscall distress*, dan *legislature size* terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian dengan harapan akan menghasilkan temuan yang jauh lebih variatif dikarenakan kedua penelitian tersebut juga memiliki temuan penelitian serupa. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengembangkan penelitian Uttunggadewi et al. (2024), Tampubolon et al. (2023), serta

Putri et al. (2023) yang belum menggunakan *legislature size* sebagai variabel independennya.

2. Manfaat bagi Praktisi

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membantu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat regulasi dan pengawasan untuk mengurangi risiko diskresi akrual yang tidak diinginkan, sehingga meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan. Selain itu, peningkatan kapasitas fiskal dan pengelolaan fiskal yang sehat dapat meminimalisir tekanan fiskal (*fiscal distress*) yang sering menjadi pemicu manipulasi laporan. Ukuran legislatif yang besar juga perlu mendapat perhatian khusus karena dapat meningkatkan peluang manipulasi, sehingga perlu mekanisme kontrol yang efektif dari DPRD dan aparat pengawas. Implementasi hasil penelitian ini akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah di Jawa Tengah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 *Agency Theory*

Teori yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976 ini memiliki konsep bahwa terdapat satu atau lebih seorang principal yang dapat memerintah orang lain yang disebut agent untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal, serta diberikan wewenang untuk membuat kebijakan sebaik mungkin yang dapat menguntungkan prinsipal. Pada kondisi yang sedemikian rupa, gesekan konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen sangat mungkin terjadi, mengingat dimana setiap individu akan selalu mementingkan kepentingannya masing-masing sehingga pihak agen dapat melakukan hal-hal diluar wewenang dan keinginan prinsipal (Olivian & Wahidahwati, 2021).

Agency theory pada penelitian ini sendiri menjelaskan hubungan antara pihak pemerintah daerah yang berperan sebagai agen dan pihak pemerintah pusat yang berperan sebagai prinsipal dalam fenomena manipulasi akrual. Teori ini memandang manipulasi akrual sebagai akibat dari konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen yang ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dan prinsipal yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas (Pina et al., 2012). Secara spesifik, *agency theory* dalam penelitian ini akan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ukuran pemerintah (*government size*), kapasitas fiskal, *fiscal distress*, dan ukuran

legislatif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah melalui mekanisme konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal (pemerintah pusat atau masyarakat) dan agen (pemerintah daerah).

Ukuran pemerintah yang besar menunjukkan kompleksitas dan beragam fungsi pemerintah daerah, yang membuka peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menggunakan diskresi akrual dalam pelaporan keuangan guna memanipulasi hasil laporan demi pencitraan atau insentif tertentu (Prayuda & Arifin, 2024). Kemudian, kapasitas fiskal yang lebih besar dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan manipulasi akrual karena adanya fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan (Febrianti, 2022). Sebaliknya, kondisi *fiscal distress* atau kesulitan keuangan yang dialami pemerintah daerah, seperti defisit anggaran, mendorong pemerintah untuk melakukan manipulasi akrual sebagai upaya menutupi kinerja keuangan yang buruk dan menghindari persepsi negatif dari pemangku kepentingan (Tampubolon et al., 2023). *Legislature size* sendiri berperan sebagai mekanisme pengawasan; legislatif yang lebih besar diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga menekan praktik manipulasi akrual, namun jika terlalu besar juga dapat menimbulkan birokrasi yang kompleks dan melemahkan efektivitas pengawasan (Evelindasari, 2020).

2.1.2 Manipulasi Akrual Pemerintah Daerah

Manipulasi akrual pemerintah daerah adalah praktik di mana pemerintah daerah secara sengaja melakukan penyesuaian atau perubahan dalam pelaporan keuangan, khususnya pada pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan

pengeluaran, dengan memanfaatkan kebebasan (diskresi) yang diberikan oleh sistem akuntansi berbasis akrual (Shafira & Abdullah, 2022). Praktik ini bertujuan untuk memengaruhi persepsi atas kinerja keuangan pemerintah daerah, baik untuk menampilkan kinerja yang lebih baik dari kenyataan, menyamarkan defisit anggaran, atau mencapai target tertentu yang diharapkan oleh pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan lainnya (Tampubolon et al., 2023).

Sistem akuntansi berbasis akrual yang mulai diterapkan secara penuh di pemerintah daerah Indonesia sejak 2015 memberikan ruang bagi terjadinya manipulasi akrual, karena dalam sistem ini, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu dan besaran pengakuan transaksi keuangan (Handayani et al., 2022). Misalnya, pemerintah daerah dapat menunda pengakuan pengeluaran atau mempercepat pengakuan pendapatan agar laporan keuangan tampak lebih baik pada periode tertentu. Diskresi ini seringkali sulit dideteksi, sehingga dapat disalahgunakan untuk memanipulasi informasi keuangan yang disajikan kepada publik otoritas pengawas (Tampubolon et al., 2023).

Motif utama di balik manipulasi akrual di sektor publik berbeda dengan sektor privat. Jika di sektor privat manipulasi akrual biasanya bertujuan untuk meningkatkan laba atau nilai perusahaan, di sektor publik praktik ini sering dilakukan untuk meningkatkan citra kinerja keuangan pemerintah daerah, memperoleh insentif dari pemerintah pusat, atau menghindari sanksi akibat defisit anggaran (Adnan et al., 2023). Selain itu, manipulasi akrual juga dapat dipicu oleh adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemerintah pusat

(prinsipal) dan pemerintah daerah (agen), sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan (Putri et al., 2023).

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik manipulasi akrual berdampak negatif terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang telah dimanipulasi tidak lagi mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga dapat menyesatkan para pengambil keputusan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan peningkatan integritas dalam pelaporan keuangan sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya manipulasi akrual di lingkungan pemerintah daerah.

2.1.3 *Government Size*

Government size atau ukuran pemerintah daerah mencerminkan seberapa besar beban tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh Pemda guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai kewenangannya (Handayani et al., 2022). Ukuran pemerintahan daerah terkait dengan tingkatan desentralisasi fiskal yang diterapkan dan besaran belanja (Bradbury & Stephenson, 2003; Qiao et al., 2019). Damanpour dalam Sari et al. (2016) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah terkait dengan jumlah penduduk dan nilai aset. Ukuran pemerintah daerah dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemda karena semakin besar ukuran Pemda maka akan semakin besar pula peluang kemudahan Pemda dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, sebaliknya ukuran Pemda

yang kecil akan cenderung mengalami kesulitan dalam pelaksanaan operasionalnya (Aziz, 2016).

Penjelasan di atas sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa aset yang besar juga meningkatkan risiko konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, di mana pemerintah daerah sebagai agen dapat menyalahgunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini berpotensi menimbulkan manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan, karena pemerintah daerah mungkin melakukan rekayasa laporan untuk menutupi penyalahgunaan atau ketidakefisienan pengelolaan aset (Prayuda & Arifin, 2024). Selain itu, semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin kompleks pengelolaan aset dan anggaran yang harus dilakukan, sehingga meningkatkan peluang terjadinya manipulasi akrual demi menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dari kenyataan (Rosalina et al., 2022).

2.1.4 Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan potensial dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber mereka sendiri dalam rangka membayar kebutuhan pelayanan standar barang dan jasa masyarakat (Martinez-Vazquez & Boex, 1997). Nagowski (2007) menyatakan bahwa kapasitas fiskal adalah pengukur kemampuan suatu daerah untuk membayar pelayanan publik yang dibutuhkan. Kapasitas fiskal tergantung dari kapasitas pendapatan dan kebutuhan pengeluaran suatu daerah. Baskaran & Bigsten (2013) menyatakan konsep kapasitas fiskal mengacu pada kemampuan

ekstraktif negara, yaitu bagaimana jumlah dan jenis sumber daya negara secara teoritis bisa diekstrak dan sejauh mana ekstraksi ini berlangsung secara "efisien".

Kapasitas fiskal pemerintah daerah di Indonesia sendiri dihitung dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) setiap tahunnya. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.07/2020 menyatakan bahwa kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Perhitungan kapasitas fiskal yang akan menghasilkan angka dengan sebutan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) untuk masing-masing pemerintah daerah. Nilai IKFD tergolong dari beberapa kategori yakni sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah.

2.1.5 Fiscal Distress

Fiscal distress merupakan ketidakberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan (Shafira & Abdullah, 2022). Pada sektor privat, *fiscal distress* juga digambarkan sebagai kekurangan yang signifikan (dalam keuangan perusahaan) yang berakibat pada kegagalan membayar dividen pada saham preferen dan obligasi korporasi dan berujung pada kebangkrutan atau pailit (Pradana & Sarjiyanto, 2023). Kesulitan fiskal (*fiscal distress*) sebagai bentuk kegagalan dalam pemenuhan kewajiban, seperti utang, pelayanan publik, dan kebutuhan akan sumber daya selama bertahun-tahun (Kloha et al., 2005). Sejatinya, *fiscal distress* merupakan sebuah kejadian *unpredictable* akibat kondisi pemerintah yang

tidak stabil. *Fiscal distress* merupakan akibat dari kegagalan pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk pembayaran utang, proses pembangunan, dan kegiatan pelayanan publik lainnya. *Fiscal distress* dapat menyebabkan berkurangnya investor modal pada pemerintah daerah terkait yang akan berakibat pada macetnya kredit pemerintah untuk membayar pengeluaran lain dan pengeluaran untuk pembangunan (Pradana & Sarjiyanto, 2023).

Fiscal distress ini merupakan penurunan sumber daya daerah (aset bersih) yang signifikan, sehingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban atau belanjanya. Dalam agensi teori, dijelaskan bahwa Dalam kondisi *fiscal distress*, yaitu ketidakmampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan anggaran akibat defisit atau pendapatan yang lebih rendah dari pengeluaran, pemerintah daerah sebagai agen terdorong untuk melakukan manipulasi akrual guna memperbaiki citra kinerja keuangan yang dilaporkan kepada pemerintah pusat dan publik (Tampubolon et al., 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *fiscal distress* meningkatkan peluang dan dorongan pemerintah daerah untuk melakukan manipulasi akrual sebagai upaya untuk menutupi masalah keuangan dan mempertahankan legitimasi serta dukungan dari principal.

2.1.6 Legislature Size

Ukuran legislatif berhubungan dengan penggunaan informasi yang tersaji dalam LKPD untuk pengambilan keputusan penting di pemerintahan daerah, terutama dalam hal menilai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan perubahan anggaran selama tahun berjalan (Junita et al., 2018). Secara matematis,

jumlah anggota legislatif sejalan dengan jumlah populasi, sehingga semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin besar pula kepentingan konstituen (populasi) yang harus diperjuangkan. Akibatnya, semakin besar kemungkinan terjadinya alokasi dan kebijakan perubahan APBD di tahun berjalan (Junita et al., 2018). Menurut Ricciuti (2004) ukuran legislatif memiliki efek yang tidak terbatas karena adanya praktik balas jasa kepada pemilih (*voters*). Legislatif (DPRD) sebagai principal membutuhkan informasi terutama untuk pertanggungjawaban kinerja dan keuangan yang tersaji dalam LKPD merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah diaudit oleh BPK RI.

Menurut Evelindasari (2020), besarnya ukuran legislatif dapat menimbulkan biaya yang berlebihan dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan, yang berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan. Prayuda & Arifin (2024) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran legislatif, diharapkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin ketat sehingga dapat mengurangi peluang manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, teori agensi menyatakan bahwa ukuran legislatif yang optimal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dengan mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen serta meminimalkan manipulasi akrual dalam laporan keuangan.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu mengenai *government size*, kapasitas fiskal, *fiscal distress*, dan *legislature size* dapat diringkaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Penulis (Tahun) | Variabel Penelitian | Sampel dan Metode Analisis | Hasil |
|----|-------------------------------|---|---|--|
| 1 | Handayani et al. (2022) | <ul style="list-style-type: none"> • X1: <i>Government Size</i> • X2: Kapasitas Fiskal • X3: <i>Fiscal Distress</i> • X4: <i>Legislature Size</i> • Y: Manipulasi Akrual | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: seluruh Pemda kabupaten/kota di Indonesia, yang sampai dengan 31 Desember 2020 seluruhnya ada sebanyak 508 • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | <i>Government size</i> dan <i>fiscal distress</i> berpengaruh negatif dan <i>legislature size</i> berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan Pemda, sedangkan kapasitas fiskal tidak berpengaruh. |
| 2 | Adnan et al. (2023) | <ul style="list-style-type: none"> • X1: <i>Government Size</i> • X2: Kapasitas Fiskal • X3: <i>Fiscal Distress</i> • X4: <i>Legislature Size</i> • Y: Manipulasi Akrual | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 23 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | <i>Government size</i> dan <i>legislature size</i> berpengaruh, sedangkan kapasitas fiskal dan <i>fiscal distress</i> tidak berpengaruh terhadap manipulasi akrual. |
| 3 | Putri et al. (2023) | <ul style="list-style-type: none"> • X1: <i>Government Size</i> • X2: Kapasitas Fiskal • Y: Manipulasi Akrual | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 179 Kabupaten/Kota se-Indonesia • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | Secara parsial, <i>government size</i> berpengaruh positif sedangkan kapasitas fiskal berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual. Secara simultan, keduanya berpengaruh |

| No | Penulis (Tahun) | Variabel Penelitian | Sampel dan Metode Analisis | Hasil |
|----|-----------------------------------|--|---|--|
| 4 | Uttunggade wi et al. (2024) | <ul style="list-style-type: none"> • X1: <i>Fiscal Distress</i> • X2: <i>Fiscal Capacity</i> • X3: <i>Government Size</i> • X4: SiLPA • Y: Manipulasi Akrua | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022 • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | <p>terhadap manipulasi akrua.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial fiscal distress, ukuran pemerintah, dan perhitungan kelebihan anggaran berpengaruh signifikan terhadap manipulasi akrua. Sementara itu, variabel kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap manipulasi akrua. Uji penelitian secara simultan menunjukkan hasil bahwa fiscal distress, kapasitas fiskal, ukuran pemerintah, dan perhitungan kelebihan anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manipulasi akrua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan</p> |

| No | Penulis (Tahun) | Variabel Penelitian | Sampel dan Metode Analisis | Hasil |
|----|------------------------------|--|---|---|
| 5 | (Tampubolon et al. (2023)) | <ul style="list-style-type: none"> • X1: <i>Government Size</i> • X2: <i>Fiscal Distress</i> • X3: SiLPA • Y: Manipulasi Akrua | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Pemerintah Daerah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021 • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | Hasil dari temuan penelitian yang diperoleh adalah <i>government size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap manipulasi akrua karena tidak terkait langsung dalam pengelolaan keuangan, sedangkan <i>fiscal distress</i> dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap manipulasi akrua. |
| 6 | Shafira & Abdullah (2022) | <ul style="list-style-type: none"> • X1: SiLPA • X2: <i>Financial Distress</i> • Y: Manipulasi Akrua | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 375 Kabupaten/Kota se-Indonesia 2019 • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | SiLPA dan <i>financial distress</i> berpengaruh terhadap manipulasi akrua pada LKPD Kabupaten/Kota se-Indonesia 2019. |
| 7 | Olivian & Wahidahwati (2021) | <ul style="list-style-type: none"> • X1: <i>Leverage</i> • X2: Ukuran Perusahaan • X3: Kualitas Auditor • Y: Manipulasi Aktivitas Riil | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 24 Perusahaan Sektor <i>Consumer Goods</i> 2015-2019 • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap aktivitas riil, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manipulasi aktivitas riil. Sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manipulasi aktivitas riil. Secara bersama-sama kualitas audit, |

| No | Penulis (Tahun) | Variabel Penelitian | Sampel dan Metode Analisis | Hasil |
|----|--------------------|---|---|--|
| | | | | leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manipulasi aktivitas riil |
| 8 | Gamayuni (2022) | <ul style="list-style-type: none"> • X1: <i>Abnormal Accruals</i> • X2: <i>Leverage</i> • Y: <i>Surplus Deficit</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 34 Provinsi se-Indonesia 2016-2019 • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | <i>Abnormal Accrual</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Surplus Deficit</i> pada LKPD Provinsi se-Indonesia 2016-2019. |
| 9 | Pilcher (2011) | <ul style="list-style-type: none"> • X1: <i>Earning Management</i> • X2: <i>Discretionary Accruals</i> • X3: <i>Spesific Accruals</i> • Y: <i>Local Government Financial Report</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Negara bagian New South Wales, Australia, 2003-2004 sampai 2005-2006 • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | <i>Earning management</i> , <i>specific accruals</i> , dan <i>discretionary accruals</i> secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah New South Wales |
| 10 | Pina et al. (2012) | <ul style="list-style-type: none"> • X: <i>Financial targets</i> • Y: <i>Accrual based measures</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Institusi Publik di Inggris 2006-2008) • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | <i>Financial targets</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>accrual based measures</i> yang diterapkan di institusi publik di Inggris selama 2006-2008 |

| No | Penulis (Tahun) | Variabel Penelitian | Sampel dan Metode Analisis | Hasil |
|----|---------------------------------------|--|---|--|
| 11 | Thusa'dia et al. (2025) | <ul style="list-style-type: none"> • X1: Ukuran Pemerintah • X2: Kapasitas Fiskal • Y: Diskresi Akrua | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2018-2022 • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | Ukuran pemerintah berpengaruh positif, sedangkan kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap diskresi akrual |
| 12 | Rohman (2016) | <ul style="list-style-type: none"> • X: Diskresi Akrua • Y: SiLPA | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 18 Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan 2014-2015 • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | Diskresi akrual memiliki pengaruh terhadap SiLPA dalam LKPD pemerintah daerah di Sumatera Selatan selama tahun 2014-2015. |
| 13 | Cohen et al. (2019) | <ul style="list-style-type: none"> • X: <i>Political Factor</i> • Y: <i>Earnings Management on Local Government</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: Pemerintah di Negara Yunani dan Italia 2002-2015 • Metode Analisis: analisis regresi linear berganda | Faktor politik dapat meningkatkan peluang dan tindakan manajemen laba akrual pada pemerintah di Yunani dan Italia dalam medio 2002-2015. |
| 14 | Anessi-Pessina & Sicilia (2019) | <ul style="list-style-type: none"> • X: <i>CFO's Individual</i> • Y: <i>Accounting Manipulation</i> • Z: <i>Managerial Discretion, Job Demand</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 20 pemerintah pusat di 20 Negara • Metode Analisis: analisis regresi mediasi | Secara tidak langsung, <i>CFO's individuals</i> mampu mempengaruhi <i>accounting manipulation</i> melalui <i>managerial discretion</i> namun tidak melalui <i>job demand</i> . Adapun secara langsung, |

| No | Penulis (Tahun) | Variabel Penelitian | Sampel dan Metode Analisis | Hasil |
|----|-------------------------|---|--|--|
| | | | | <i>CFO's individuals</i> tidak berpengaruh terhadap <i>accounting manipulation</i> . |
| 15 | Junita et al. (2018) | <ul style="list-style-type: none"> • X1: <i>Revenue Variance</i> • X2: <i>Expenditure Variance</i> • Y: <i>Local Government Budget Changes</i> • Z: <i>Legislature Size</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Sampel: 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan 14 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa • Metode Analisis: analisis regresi moderasi | <i>Revenue variance</i> berpengaruh positif, sedangkan <i>expenditure variance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>local government budget changes</i> . Setelah dimoderasi oleh <i>legislature size</i> , <i>revenue variance</i> semakin kuat pengaruhnya, sedangkan <i>expenditure variance</i> tetap tidak berpengaruh terhadap <i>local government budget changes</i> . |

2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh *Government Size* terhadap Manipulasi Akrua dalam Pelaporan Keuangan Daerah

Handayani et al. (2022) mendefinisikan *government size* sebagai ukuran dari suatu Pemda yang menggambarkan beban pelayanan publik, lingkup pelayanan publik, besaran anggaran, dan besaran kekayaan yang dimiliki. Lebih lanjut, Handayani et al. (2022) dalam risetnya tersebut mengungkapkan bahwa *government size* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual. Temuan tersebut sejalan dengan Adnan et al. (2023) serta Uttunggadewi et al. (2024) yang juga mengungkapkan hal yang sama. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Putri et al. (2023) serta Tampubolon et al. (2023) bahwa *government size* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti cenderung kepada penelitian dengan hasil positif dikarenakan setiap daerah biasanya memiliki nilai aset yang sangat besar. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa aset yang besar juga meningkatkan risiko konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, di mana pemerintah daerah sebagai agen dapat menyalahgunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini berpotensi menimbulkan manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan, karena pemerintah daerah mungkin melakukan rekayasa laporan untuk menutupi penyalahgunaan

atau ketidakefisienan pengelolaan aset (Prayuda & Arifin, 2024). Selain itu, semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin kompleks pengelolaan aset dan anggaran yang harus dilakukan, sehingga meningkatkan peluang terjadinya manipulasi akrual demi menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dari kenyataan (Rosalina et al., 2022). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Government size* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah

2.3.2 Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Manipulasi Akrual dalam Pelaporan Keuangan Daerah

Kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban belanjanya. Variabel ini diukur dengan angka selisih antara total pendapatan daerah dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan untuk belanja tertentu (Handayani et al., 2022). Adapun penelitian terkait dengan variabel ini seperti Adnan et al. (2023), Uttunggadewi et al. (2024), serta Putri et al. (2023) secara keseluruhan menemukan hasil yang sama yakni kapasitas fiskal berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual pada pemerintah daerah. Menurut teori agensi, ketika kapasitas fiskal tinggi, tekanan dari prinsipal terhadap agen akan lebih mudah dikelola, karena agen memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan program tanpa perlu menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya. Dalam situasi ini, risiko terjadinya manipulasi akrual menjadi lebih rendah, karena tidak ada insentif kuat bagi pemerintah daerah selaku agen untuk menyesatkan prinsipal mengenai kinerja atau kondisi fiskal

Namun sebaliknya, menurut Febrianti (2022) ketika sebuah pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang rendah maka akan mencerminkan keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dan infrastruktur yang memadai, sehingga pemerintah daerah cenderung menggunakan manipulasi akrual sebagai diskresi untuk melaporkan kinerja keuangan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan anggaran, terutama untuk menghindari defisit. Hal ini relevan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kapasitas fiskal rendah, pemerintah daerah menghadapi tekanan tinggi untuk menunjukkan kinerja yang tetap baik meskipun keterbatasan sumber daya ada. Asimetri informasi memberi ruang bagi agen untuk melakukan tindakan oportunistik, misalnya memanipulasi akrual guna menunjukkan laporan keuangan yang tampak sehat, demi menghindari penalti, tekanan politis, atau kehilangan kepercayaan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti kemudian merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kapasitas fiskal berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah

2.3.3 Pengaruh *Fiscal Distress* terhadap Manipulasi Akrual dalam Pelaporan Keuangan Daerah

Fiscal distress ini merupakan penurunan sumber daya daerah (aset bersih) yang signifikan, sehingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban atau belanjanya. Terkait dengan pengaruhnya terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan daerah, Tampubolon et al. (2023) serta

Uttunggadewi et al. (2024) menemukan adanya pengaruh positif yang diberikan terhadap manipulasi akrual. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, Adnan et al. (2023) maupun Handayani et al. (2022) justru mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh negatif *fiscal distress* terhadap manipulasi akrual.

Dalam agensi teori, dijelaskan bahwa Dalam kondisi *fiscal distress*, yaitu ketidakmampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan anggaran akibat defisit atau pendapatan yang lebih rendah dari pengeluaran, pemerintah daerah sebagai agen terdorong untuk melakukan manipulasi akrual guna memperbaiki citra kinerja keuangan yang dilaporkan kepada pemerintah pusat dan publik (Tampubolon et al., 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *fiscal distress* meningkatkan peluang dan dorongan pemerintah daerah untuk melakukan manipulasi akrual sebagai upaya untuk menutupi masalah keuangan dan mempertahankan legitimasi serta dukungan dari prinsipal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Fiscal distress* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah

2.3.4 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Manipulasi Akrual dalam Pelaporan Keuangan Daerah

Legislature size mencerminkan beban politik dalam penganggaran dan akuntabilitas di daerah, dimana semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin besar pula kepentingan konstituen yang harus diperjuangkan untuk diakomodasi dalam APBD dianggap berpengaruh positif oleh Adnan et al. (2023) dan Handayani et al. (2022) tanpa adanya penelitian lain dengan temuan berbeda

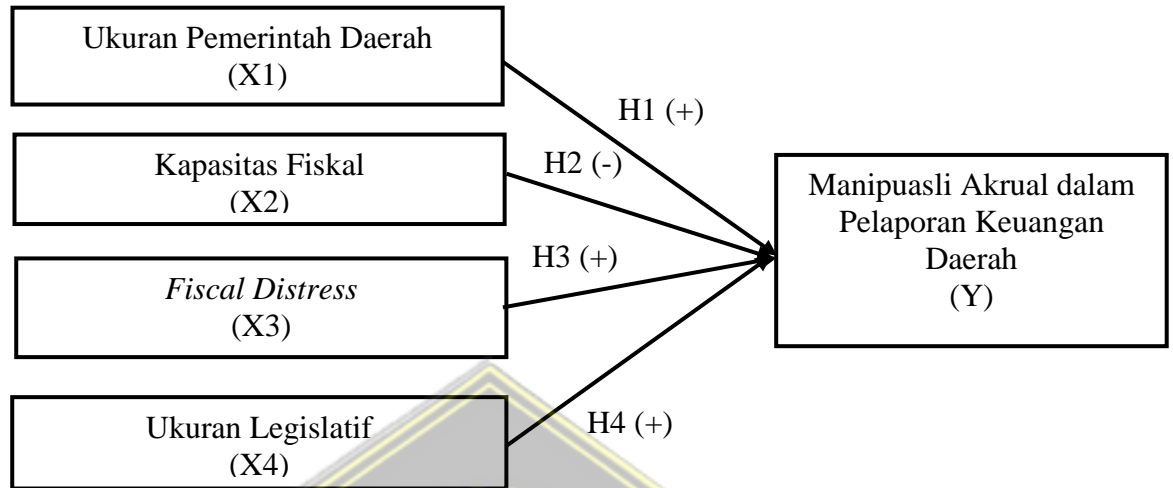
terhadap manipulasi akrual pada pemerintah daerah. Menurut Evelindasari (2020), besarnya ukuran legislatif dapat menimbulkan biaya yang berlebihan dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan, yang berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan. Lebih lanjut, Evelindasari (2020) menjelaskan bahwa dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia, efektivitas DPRD sebagai pengawas keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kapasitas anggotanya, afiliasi politik, kepentingan elektoral, dan integritas.

Dalam kajian teori agensi, penjelasan di atas mencerminkan mekanisme monitoring yang tidak selalu optimal, sehingga peran ukuran legislatif harus dilihat secara hati-hati terhadap konteks manipulasi akrual. Disisi lain, Prayuda & Arifin (2024) menjelaskan bahwa sejatinya semakin besar ukuran legislatif, diharapkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin ketat sehingga dapat mengurangi peluang manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan, peneliti kemudian merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Legislature size* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah

2.4 KERANGKA KONSEPTUAL

Model kerangka penelitian menempatkan Ukuran Pemerintah Daerah, Kapasitas Fiskal, Tekanan Fiskal dan Ukuran Legislatif sebagai variabel independen, serta Pelaporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian Determinan Manipulasi Akrua Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Secara umum, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Jenis dan pendekatan ini merupakan kombinasi yang bertujuan mengumpulkan data-data kuantitatif berupa angka-angka yang kemudian akan ditelaah secara mendalam berdasarkan standar, ketentuan, serta teori yang ada. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2022:68) merupakan penelitian yang fokus kepada analisis angka-angka statistik baik itu berupa angka ordinal, persentase, dan model statistik lainnya guna menjawab hipotesis (hubungan atau pengaruh antar variabel) yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pendekatan kausalitas sendiri menurut Sugiyono (2022:176) merupakan model penelitian yang berfokus mencari dan menjelaskan pengaruh atau hubungan antar satu variabel dengan variabel lain yang memiliki sebab akibat. Pemilihan metode kuantitatif kausalitas dalam penelitian ini dipilih untuk mengetahui data-data statistik serta hubungan sebab akibat dari pengaruh *government size*, kapasitas fiskal, *fiscal distress*, dan *legislature size* sebagai determinan manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah suatu wilayah yang general dan terdiri dari objek/subjek. Populasi dalam penelitian ini merupakan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit BPK pada periode 2021-2023.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat khusus yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini menggunakan Teknik Sampel Jenuh yaitu teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel pada penelitian ini yaitu 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dengan periode 2021-2023. Sampel pada penelitian ini berjumlah 105 sampel.

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang telah diaudit dan dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan data jumlah anggota DPRD dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2022:68), metode dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang terdapat pada buku, arsip, dokumen, angka, dan gambar beserta format pada sebuah laporan maupun

suatu keterangan yang dapat dipergunakan untuk penelitian. Data pada penelitian ini didapatkan dengan cara mengunduh laporan keuangan kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang telah diaudit dan dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

3.5 DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain dan menjadi penyebab perubahan variabel (Sugiyono, 2022:151). Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel independent yaitu *government size*, kapasitas fiskal, *fiscal distress*, dan *legislature size*.

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen/terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas) atau menjadi akibat dari variabel independen (Sugiyono, 2022:151). Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu Manipulasi Akrua dalam pelaporan keuangan daerah.

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator

| No | Variabel | Definisi Operasional | Indikator |
|----------------------------|------------------------|---|---|
| Variabel Dependen | | | |
| 1. | Manipulasi Akruai | Manipulasi akrual diartikan sebagai rekayasa akrual yang dilakukan oleh penyusun LKPD untuk melaporkan hasil yang diinginkan, yang berbeda dari yang sebenarnya yang dapat terjadi ketika Pemda menerapkan basis akuntansi akrual dalam pelaporan keuangannya. | $TACCI_{i,n} = EXBI_{i,n} - CFO_{i,n}$ Keterangan: $TACCI_{i,n}$: total akrual Pemda i pada tahun n $EXBI_{i,n}$: pendapatan sebelum pos luar biasa (surplus/defisit) Pemda i pada tahun n $CFO_{i,n}$: Arus kas bersih dari aktifitas operasi Pemda i pada tahun n Sumber: (Cohen et al., 2019; Pilcher, 2011) |
| Variabel Independen | | | |
| 1. | <i>Government Size</i> | Government Size (GS) merupakan ukuran dari suatu Pemda yang menggambarkan beban pelayanan publik, lingkup pelayanan publik, besaran anggaran, dan besaran kekayaan yang dimiliki. Variabel ini diukur dengan jumlah aset yang tersaji dalam neraca per tanggal 31 Desember. | Jumlah aset yang tersaji dalam neraca per tanggal 31 Desember. Sumber: (N. M. D. P. S. Sari & Mustanda, 2019) |
| 2. | Kapasitas Fiskal | Kapasitas Fiskal (KF) mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban belanjanya. Variabel ini diukur dengan angka selisih antara total pendapatan daerah dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan untuk belanja tertentu. | Selisih antara total pendapatan daerah dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan untuk belanja tertentu. Sumber: (Handayani et al., 2022) |
| 3. | <i>Fiscal Distress</i> | Fiscal Distress (FD) adalah penurunan sumber | Surplus/defisit-LO yang tersaji |

| No | Variabel | Definisi Operasional | Indikator |
|----|-------------------------|---|---|
| | | daya daerah (aset bersih) yang signifikan, sehingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban atau belanjanya. Variabel ini diukur dengan nilai surplus/defisit-LO yang tersaji dalam laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember. | dalam laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember. Sumber: (Tampubolon et al., 2023) |
| 4. | <i>Legislature Size</i> | Legislature Size (LS) mencerminkan beban politik dalam penganggaran dan akuntabilitas di daerah, dimana semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin besar pula kepentingan konstituen yang harus diperjuangkan untuk diakomodasi dalam APBD (Abdullah, 2012). Variabel ini diukur dengan jumlah anggota DPRD. | jumlah anggota Kabupaten/Kota DPRD Sumber: (Junita et al., 2018) |

3.6 METODE ANALISIS DATA

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menurut Sugiyono (2022:179) digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Analisis statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran jawaban dan demografi responden penelitian. Data

tersebut dapat meliputi informasi seperti umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja, suku, dan informasi demografis lainnya.

3.6.2 Uji Normalitas

Sugiyono (2022:180-181) menjelaskan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dua model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat menggunakan dua cara yaitu:

1. Uji kolmogorov smirnov, di mana jika probabilitas $< 0,05$ maka data penelitian memenuhi asumsi normalitas. Namun apabila probabilitas $> 0,05$ maka data penelitian dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas.
2. Grafik normalitas *probability plot*, di mana data dianggap memenuhi asumsi normalitas bilamana titik-titik pada grafik berkumpul dan mendekati sepanjang garis diagonal.

3.6.3 Uji Multikolinearitas

Sugiyono (2022:181) mengungkapkan uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Lebih lanjut, Sugiyono (2022:182) menjelaskan bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak orthogonal. Adapun cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
2. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 , maka terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut.

3.6.4 Uji Heterokedastisitas

Sugiyono (2022:183) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot*. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang beraturan maka itu menunjukkan bahwa heteroskedastisitas telah terjadi, dan apabila tidak ditemukan pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terjadi. Intrepetasi yang digunakan selain melihat grafik *ScatterPlot* adalah uji park. Uji ini dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Masalah heterokedastisitas tidak akan terjadi apabila nilainya signifikansi antara variabel independen dengan absolut lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 pada tingkat kepercayaan 5%.

3.6.5 Analisis Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen

(Sugiyono, 2022:185). Nilai R^2 memiliki interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$).

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah, sebagai berikut:

1. Jika nilai *Adjusted* R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika *Adjusted* R^2 bernilai kecil (menjauhi 1) berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen masih sangat terbatas.

3.6.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression*) digunakan untuk menguji variabel satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan (Sugiyono, 2022:187) Secara sistematis adapun rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Manipulasi Akruall

X_1 = *Government Size*

X_2 = *Kapasitas Fiskal*

X_3 = *Fiscal Distress*

X_4 = *Legislature Size*

α = Konstanta

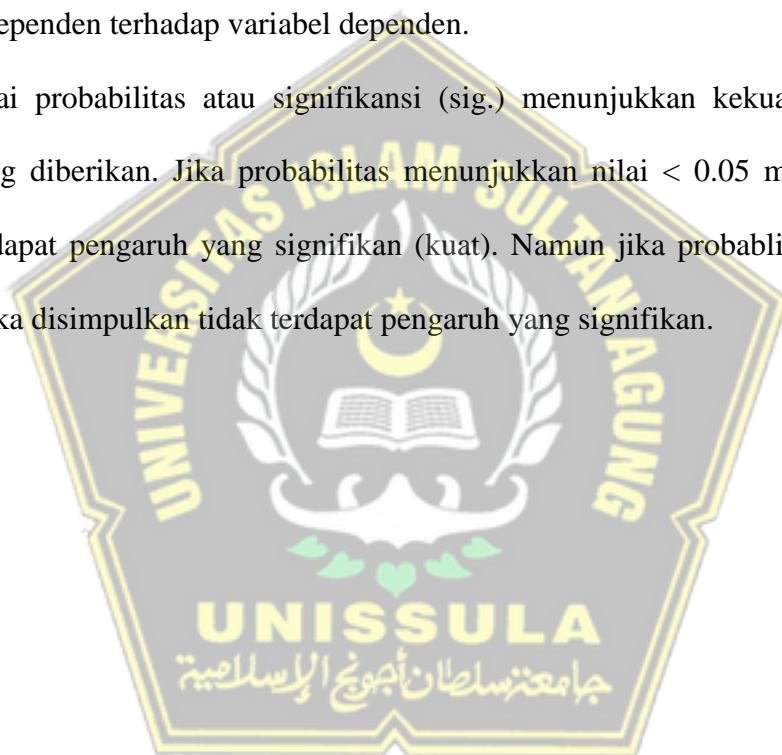
β = Koefisien Variabel

e = *Error Term*

3.6.7 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dalam penelitian ini sendiri menggunakan dua kriteria sebagai berikut:

1. Koefisien regresi menunjukkan arah hubungan (positif/negatif) antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Nilai probabilitas atau signifikansi (sig.) menunjukkan kekuatan pengaruh yang diberikan. Jika probabilitas menunjukkan nilai < 0.05 maka dianggap terdapat pengaruh yang signifikan (kuat). Namun jika probabilitasnya > 0.05 maka disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Sejarah Singkat Provinsi Jawa Tengah

Dikutip dari website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2025), sejak abad ke-7 wilayah Jawa Tengah dipenuhi kerajaan-kerajaan besar seperti Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima sekitar tahun 674, lalu Kerajaan Medang (Mataram Hindu) di bawah Sanjaya pada 732 M, yang kemudian membangun Candi Prambanan. Dinasti Syailendra turut memberi sumbangan besar melalui pembangunan Candi Borobudur, Sewu, dan Kalasan. Memasuki abad ke-16, setelah runtuhnya Majapahit, Kerajaan Demak berdiri dan menjadi pusat penyebaran Islam. Setelah jatuhnya Demak, Pajang muncul dengan Sultan Adiwijaya sebagai raja, diikuti oleh pembentukan Kerajaan Mataram Islam oleh Panembahan Senopati (Danang Sutawijaya), yang menerima tanah Mataram sebagai hadiah setelah menumpas pemberontakan Aryo Penangsang. Seiring kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda melalui VOC mulai mendominasi Jawa Tengah dan menundukkan politik-ekonomi wilayah tersebut.

Memasuki era kolonial Belanda, terjadi pembagian wilayah dan perubahan administratif, termasuk Perjanjian Giyanti 1755 yang membagi Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Setelah kemerdekaan RI, Provinsi Jawa Tengah secara resmi terbentuk berdasarkan UU No. 10 Tahun 1950 pada 15 Agustus 1950, lalu ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa

Tengah. Namun, melalui UU No. 11 Tahun 2023, Hari Jadi dipindahkan ke 19 Agustus 1945, mengikuti keputusan awal PPKI, yang menunjuk Raden Pandji Soeroso sebagai gubernur pertama, sehingga Provinsi Jateng “lahir” sejajar dengan kemerdekaan Indonesia.

4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah

VISI

“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”

MISI

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas.
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif.
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Tengah
Sumber: (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2025)

Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 32.544,02 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 2.138,51 km², sedangkan Kota Magelang merupakan daerah terkecil dengan luas 18,12 km². Berikut merupakan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.1 Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

| No. | Kabupaten/Kota | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| Kabupaten | | | |
| 1 | Cilacap | 2 138,51 | 6,57 |
| 2 | Banyumas | 1 327,59 | 4,08 |
| 3 | Purbalingga | 777,65 | 2,39 |
| 4 | Banjarnegara | 1 069,74 | 3,29 |
| 5 | Kebumen | 1 282,74 | 3,94 |
| 6 | Purworejo | 1 034,82 | 3,18 |
| 7 | Wonosobo | 984,68 | 3,03 |
| 8 | Magelang (Kab.) | 1 085,73 | 3,34 |
| 9 | Boyolali | 1 015,07 | 3,12 |
| 10 | Klaten | 655,56 | 2,01 |
| 11 | Sukoharjo | 466,66 | 1,43 |
| 12 | Wonogiri | 1 822,37 | 5,60 |
| 13 | Karanganyar | 772,20 | 2,37 |
| 14 | Sragen | 946,49 | 2,91 |
| 15 | Grobogan | 1 975,85 | 6,07 |
| 16 | Blora | 1 794,40 | 5,51 |
| 17 | Rembang | 1 014,10 | 3,12 |
| 18 | Pati | 1 491,20 | 4,58 |
| 19 | Kudus | 425,17 | 1,31 |
| 20 | Jepara | 1 004,16 | 3,09 |
| 21 | Demak | 897,43 | 2,76 |

| No. | Kabupaten/Kota | Luas (km ²) | Persentase (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 22 | Semarang (Kab.) | 946,86 | 2,91 |
| 23 | Temanggung | 870,23 | 2,67 |
| 24 | Kendal | 1 002,27 | 3,08 |
| 25 | Batang | 788,95 | 2,42 |
| 26 | Pekalongan (Kab.) | 836,13 | 2,57 |
| 27 | Pemalang | 1 011,90 | 3,11 |
| 28 | Tegal (Kab.) | 879,70 | 2,70 |
| 29 | Brebes | 1 657,73 | 5,09 |
| Kota | | | |
| 30 | Magelang (Kota) | 18,12 | 0,06 |
| 31 | Surakarta | 44,03 | 0,14 |
| 32 | Salatiga | 52,96 | 0,16 |
| 33 | Semarang (Kota) | 373,67 | 1,15 |
| 34 | Pekalongan (Kota) | 44,96 | 0,14 |
| 35 | Tegal (Kota) | 34,49 | 0,11 |
| Provinsi Jateng | | 32 544,02 | 100,00 |

Sumber: (PKP Jawa Tengah, 2020)

4.1.4 Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah mencapai 37.892.280 jiwa. Dari total tersebut, penduduk laki-laki berjumlah 18.854.540 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sedikit lebih banyak, yaitu 19.037.740 jiwa. Rasio jenis kelamin berada pada angka 99, yang menunjukkan bahwa terdapat 99 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahunan tercatat sebesar 1,00%, mencerminkan pertumbuhan yang relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara geografis, kepadatan penduduk rata-rata di Provinsi Jawa Tengah adalah 200 jiwa per kilometer persegi. Beberapa wilayah menunjukkan tingkat kepadatan yang jauh lebih tinggi, seperti Kota Surakarta yang mencapai 11.258 jiwa/km², sedangkan Kabupaten Blora merupakan wilayah dengan kepadatan

penduduk paling rendah, hanya 490 jiwa/km². Pola persebaran ini memperlihatkan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan pusat ekonomi, sementara wilayah pedesaan dan perbatasan cenderung memiliki jumlah penduduk yang lebih jarang.

Tabel 4.2 Tabel Demografi Provinsi Jawa Tengah 2024

| No | Kabupaten/Kota | Penduduk (jiwa) | Pertumbuhan (%) | Distribusi (%) | Kepadatan (jiwa/km ²) | Rasio Jenis Kelamin |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Cilacap | 2.027.380 | 1,11 | 5,35 | 872 | 101,4 |
| 2 | Banyumas | 1.847.100 | 1,04 | 4,88 | 1.328 | 101,2 |
| 3 | Purbalingga | 1.037.640 | 1,03 | 2,74 | 1.288 | 102,4 |
| 4 | Banjarnegara | 1.057.560 | 1,03 | 2,79 | 924 | 102,9 |
| 5 | Kebumen | 1.414.750 | 1,25 | 3,73 | 1.060 | 102,8 |
| 6 | Purworejo | 795.030 | 0,86 | 2,10 | 735 | 100,3 |
| 7 | Wonosobo | 920.510 | 1,23 | 2,43 | 910 | 103,7 |
| 8 | Magelang (Kab.) | 1.341.450 | 0,84 | 3,54 | 1.187 | 101,1 |
| 9 | Boyolali | 1.099.850 | 0,92 | 2,90 | 1.003 | 100,9 |
| 10 | Klaten | 1.292.800 | 0,68 | 3,41 | 1.851 | 99,0 |
| 11 | Sukoharjo | 941.650 | 0,99 | 2,48 | 1.908 | 99,9 |
| 12 | Wonogiri | 1.054.150 | 0,28 | 2,78 | 553 | 99,5 |
| 13 | Karanganyar | 961.910 | 0,85 | 2,54 | 1.198 | 99,4 |
| 14 | Sragen | 1.004.760 | 0,75 | 2,65 | 1.010 | 99,2 |
| 15 | Grobogan | 1.506.370 | 0,96 | 3,98 | 744 | 100,6 |
| 16 | Blora | 901.620 | 0,71 | 2,40 | 464 | 100,0 |
| 17 | Rembang | 660.170 | 0,81 | 1,76 | 641 | 101,0 |
| 18 | Pati | 1.359.360 | 0,93 | 3,62 | 872 | 99,7 |
| 19 | Kudus | 874.630 | 1,06 | 2,33 | 1.974 | 99,5 |
| 20 | Jepara | 1.221.090 | 1,06 | 3,25 | 1.208 | 101,2 |
| 21 | Demak | 1.240.510 | 1,07 | 3,31 | 1.281 | 101,8 |
| 22 | Semarang (Kab.) | 1.080.650 | 0,92 | 2,88 | 1.069 | 99,1 |
| 23 | Temanggung | 808.450 | 0,82 | 2,15 | 942 | 100,8 |
| 24 | Kendal | 1.052.830 | 1,19 | 2,81 | 1.056 | 101,6 |
| 25 | Batang | 828.880 | 1,19 | 2,21 | 978 | 101,5 |
| 26 | Pekalongan (Kab.) | 1.007.380 | 1,36 | 2,69 | 1.141 | 103,3 |

| No Kabupaten/Kota | Penduduk (jiwa) | Pertumbuhan (%) | Distribusi (%) | Kepadatan (jiwa/km ²) | Rasio Jenis Kelamin |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| 27 Pemalang | 1.523.620 | 1,25 | 4,07 | 1.355 | 102,6 |
| 28 Tegal (Kab.) | 1.101.350 | 1,28 | 2,91 | 1.702 | 102,7 |
| 29 Brebes | 1.671.880 | 1,15 | 5,45 | 1.185 | 102,8 |
| 30 Magelang (Kota) | 119.740 | 0,20 | 0,32 | 6.596 | 98,5 |
| 31 Surakarta | 524.900 | 0,29 | 1,39 | 11.302 | 96,9 |
| 32 Salatiga | 197.120 | 1,22 | 0,53 | 3.661 | 97,5 |
| 33 Semarang (Kota) | 710.070 | 0,92 | 1,87 | 4.618 | 97,9 |
| 34 Pekalongan (Kota) | 247.730 | 1,36 | 0,65 | 6.950 | 102,0 |
| 35 Tegal (Kota) | 276.920 | 1,28 | 0,73 | 7.316 | 101,6 |
| Total Jateng | 37.892.280 | 1,00 | 100,00 | 1.104 | 101,0 |

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025)

Komposisi usia penduduk Provinsi Jawa Tengah sebagian besar berada dalam kelompok usia produktif, yaitu 15 tahun ke atas. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang mencapai 71,72%, serta tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,13%. Dari total penduduk usia kerja, sebagian besar aktif bekerja, dan laki-laki mendominasi kelompok ini dibandingkan perempuan. Kegiatan ekonomi utama penduduk masih banyak didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Dari sisi pendidikan, partisipasi sekolah di kalangan penduduk usia 7–24 tahun cukup tinggi, terutama di kelompok usia 7–15 tahun yang berada di jenjang SD dan SMP. Tingkat partisipasi sekolah mulai menurun pada kelompok usia 16–18 tahun, dan semakin menurun pada kelompok usia 19–24 tahun, di mana sebagian besar sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan formal. Hal ini menunjukkan tantangan dalam meningkatkan akses dan motivasi pendidikan tinggi di kalangan remaja dan dewasa muda. Secara keseluruhan, kondisi

demografis Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menunjukkan struktur penduduk yang padat, dengan proporsi usia produktif yang besar dan partisipasi kerja yang tinggi. Namun demikian, terdapat tantangan dalam pemerataan sebaran penduduk, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta dorongan pendidikan lanjutan bagi generasi muda.

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menyajikan gambaran umum terkait dengan data penelitian seperti nilai minimal dan maksimal, nilai rata-rata, jumlah data valid, serta standar deviasi untuk masing-masing variabel yang dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | Minimum | Maximum |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Manipulasi Akrua | - 181.800.000.000 | 106.900.000.000 | - 422.000.000.000 | 110.000.000.000 |
| Government Size | 29.099 | 0.317 | 28.530 | 29.980 |
| Kapasitas Fiskal | - 1.127.000.000.000 | 296.800.000.000 | - 1.790.000.000.000 | - 501.000.000.000 |
| Fiscal Distress | 95.220.000.000 | 115.400.000.000 | - 189.000.000.000 | 380.000.000.000 |
| Legislature Size | 47.381 | 3.080 | 40.000 | 54.000 |

Sumber: Output Olah Data via JASP (2024)

Berdasarkan data yang ada ada tabel 4.3, peneliti kemudian dapat menjelaskannya sebagai berikut:

1. Variabel Manipulasi Akrua memiliki nilai rata-rata sebesar –Rp181,76 miliar dengan standar deviasi sebesar Rp106,86 miliar. Nilai minimum sebesar –Rp422 miliar dan maksimum Rp110 miliar menunjukkan bahwa praktik manipulasi akrual dapat bernilai negatif maupun positif. Nilai negatif menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung melakukan income-decreasing accrual manipulation, yaitu menurunkan nilai akrual dengan cara menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat beban agar laporan tampak lebih konservatif. Sebaliknya, nilai positif menunjukkan adanya income-increasing accrual manipulation, yaitu meningkatkan nilai akrual untuk menciptakan kesan kinerja keuangan yang lebih baik. Tingginya standar deviasi yang mencapai hampir 59% dari nilai rata-rata menunjukkan tingkat variasi yang tinggi dalam praktik manipulasi akrual di antara pemerintah daerah, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh tekanan fiskal, kebutuhan politik, dan kebijakan pelaporan yang berbeda-beda..
2. Variabel *Government Size*, yang diukur dengan logaritma natural dari total aset pemerintah daerah, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 29,099 dan standar deviasi yang sangat kecil yaitu 0,317, dengan rentang nilai dari 28,530 hingga 29,980. Ini mengindikasikan bahwa ukuran pemerintah daerah, dalam konteks total aset atau kapasitas kelembagaan, relatif homogen. Perbedaan antar daerah dalam hal ini tidak terlalu mencolok, sehingga ukuran pemerintah tidak memberikan variasi besar dalam konteks data ini. Kecilnya standar deviasi menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki kapasitas aset yang sebanding.

3. Untuk variabel Kapasitas Fiskal, diperoleh rata-rata sebesar –Rp1,127 triliun dengan standar deviasi sebesar Rp296,83 miliar, di mana nilai minimum mencapai –Rp1,790 triliun dan maksimum –Rp501 miliar. Nilai negatif yang konsisten pada seluruh data menunjukkan bahwa sebagian besar, bahkan semua, pemerintah daerah dalam sampel mengalami kekurangan kapasitas fiskal. Artinya, pendapatan yang tidak terikat penggunaannya belum mampu membiayai seluruh belanja daerah, yang mencerminkan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat dan minimnya ruang fiskal. Standar deviasi yang cukup besar menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar daerah berada dalam kondisi defisit, tingkat defisit tersebut bervariasi secara moderat antar daerah.
4. Variabel *Fiscal Distress* menunjukkan rata-rata sebesar Rp95,22 miliar, dengan standar deviasi Rp115,45 miliar, nilai minimum –Rp189 miliar, dan nilai maksimum Rp380 miliar. Adanya nilai negatif pada minimum mengindikasikan bahwa beberapa daerah tidak mengalami tekanan fiskal dan justru berada dalam posisi fiskal yang relatif sehat atau surplus. Namun, nilai rata-rata yang positif dan standar deviasi yang lebih besar dari rata-ratanya menunjukkan bahwa mayoritas daerah mengalami tekanan fiskal, dan perbedaannya sangat signifikan antar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa daerah mampu bertahan secara fiskal, banyak lainnya menghadapi risiko keuangan tinggi, yang mungkin mendorong tindakan manipulatif untuk menyesuaikan kondisi laporan keuangan dengan harapan publik dan regulasi dari pemerintah pusat..

5. Variabel *Legislature Size* menunjukkan jumlah anggota legislatif di daerah yang berkisar antara 40 hingga 54 anggota, dengan nilai rata-rata 47,38 orang dan standar deviasi 3,08. Kecilnya standar deviasi ini menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD antar daerah relatif seragam, sesuai dengan aturan nasional tentang komposisi legislatif yang biasanya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan klasifikasi wilayah. Homogenitas ini menandakan bahwa variabel ini kemungkinan memiliki pengaruh yang kecil dalam menjelaskan variasi pada manipulasi akrual secara langsung.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa praktik manipulasi akrual di pemerintah daerah sangat bervariasi, dan cenderung ke arah konservatif (negatif). Kondisi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas fiskal dan tingginya tekanan fiskal yang dialami sebagian besar daerah, sebagaimana tercermin dalam nilai rata-rata negatif dan sebaran data yang luas pada kedua variabel tersebut. Sebaliknya, homogenitas pada ukuran pemerintah dan jumlah legislatif menunjukkan bahwa tidak semua faktor struktural memiliki variasi signifikan dalam populasi sampel ini. Hubungan antara nilai rata-rata dan standar deviasi memberikan gambaran penting mengenai tingkat keragaman antar daerah dan konsistensi pola fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov test* dengan ketentuan bahwa jika signifikansi atau *p-value* $> 0,05$ maka

data dianggap berdistribusi secara normal. Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil uji normalitas penelitian ini dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

| <i>Fit Statistics</i> | | |
|-----------------------|-----------|-------|
| Test | Statistic | p |
| Kolmogorov-Smirnov | 0.093 | 0.320 |

Sumber: Output Olah Data via JASP (2024)

Data pada tabel 4.4 menunjukkan statistik K-S sebesar 0,093 dan *p-value* (signifikansi) sebesar $0,320 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak orthogonal. Adapun cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | <i>Tolerance</i> | VIF |
|-------------------------|------------------|-------|
| <i>Government Size</i> | 0,762 | 1,312 |
| Kapasitas Fiskal | 0,585 | 1,708 |
| <i>Fiscal Distress</i> | 0,895 | 1,117 |
| <i>Legislature Size</i> | 0,569 | 1,757 |

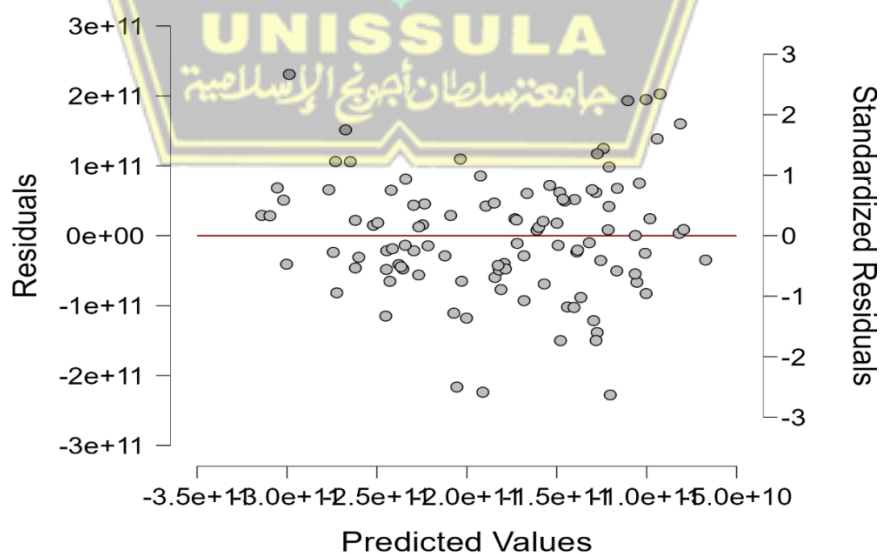
Sumber: Output Olah Data via JASP (2024)

Hasil pengujian pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Dengan

demikian, model regresi yang dibentuk oleh variabel independent terhadap variabel dependennya adalah valid.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang beraturan maka itu menunjukkan bahwa heteroskedastisitas telah terjadi, dan apabila tidak ditemukan pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terjadi. Hasil pengujian heterokedastisitas penelitian dapat diperhatikan pada grafik *scatter plot* berikut.



Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Output Olah Data via JASP (2024)

Hasil uji heterokedastisitas menggunakan grafik *scatter plot Residuals vs. Predicted* pada gambar 4.2 menunjukkan pola sebaran titik residual yang tersebar secara acak di sekitar sumbu horizontal (nilai prediksi). Tidak terlihat adanya pola tertentu, seperti pola menyebar yang mengerucut atau melebar, maupun bentuk tertentu seperti pola busur atau gelombang. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah heterokedastisitas, sehingga varians residual dapat dianggap konstan pada setiap tingkat prediksi (homoskedastisitas). Dengan demikian, asumsi klasik regresi mengenai homoskedastisitas telah terpenuhi berdasarkan hasil *scatter plot* tersebut.

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

1. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, di mana Nilai R^2 memiliki interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hasil analisis koefisien determinasi penelitian ini dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary - Manipulasi Akrua

| Model | R | R ² | Adjusted R ² | RMSE | Durbin-Watson | | |
|----------------|-------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------|
| | | | | | Autocorrelation | Statistic | P |
| M ₀ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Rp 106.900.000.000 | 0.306 | 1.366 | 0.001 |
| M ₁ | 0.587 | 0.344 | 0.318 | Rp 88.260.000.000 | 0.023 | 1.933 | 0.580 |

Note. M₁ includes Government Size, Kapasitas Fiskal, Fiscal Distress, Legislature Size

Sumber: Output Olah Data via JASP (2024)

Hasil analisis koefisien determinasi di atas menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,318 yang berarti 31,8% variasi manipulasi akrual dijelaskan oleh

government size, kapasitas fiskal, *fiscal distress*, dan *legislature size*, sedangkan 68,2% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang diujikan dalam penelitian ini. Selain itu, nilai Durbin-Watson sebesar 1,933 dengan *p-value* (signifikansi) 0,580 > 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam penelitian ini. Dengan demikian, model regresi yang dibangun dalam penelitian ini tergolong baik.

2. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dalam penelitian ini sendiri menggunakan dua kriteria. Pertama,

- a. Koefisien regresi menunjukkan arah hubungan (positif/negatif) antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Nilai probabilitas atau signifikansi (sig.) menunjukkan kekuatan pengaruh yang diberikan. Jika probabilitas menunjukkan nilai < 0.05 maka dianggap terdapat pengaruh yang signifikan (kuat). Namun jika probabilitasnya > 0.05 maka disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan, berikut disajikan hasil uji t dari penelitian ini dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji t*Coefficients*

| Model | | Unstandardized | Standard Error | Standardized | t | p |
|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------|--------|
| M ₁ | (Intercept) | 1.021.000.000.000 | 872.600.000.000 | | 1.170 | 0.245 |
| | <i>Government Size</i> | - 18.620.000.000 | 31.260.000.000 | -0.055 | -0.596 | 0.553 |
| | Kapasitas Fiskal | 0.052 | 0.038 | 0.145 | 1.369 | 0.174 |
| | <i>Fiscal Distress</i> | 0.259 | 0.079 | 0.279 | 3.263 | 0.002 |
| | <i>Legislature Size</i> | - 13.220.000.000 | 3.724.000.000 | -0.381 | -3.551 | < .001 |

Sumber: Output Olah Data via JASP (2024)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7, dapat dibuat persamaan regresi dan penafsiran sebagai berikut:

$$Y = 1,021,000,000,000 - 18,620,000,000X_1 + 0,052X_2 + 0,259X_3 + 13,220,000,000 + e$$

Penafsiran:

1. Nilai *intercept* (konstanta) sebesar 1,021,000,000,000 triliun menunjukkan jika *government size*, kapasitas fiskal, *fiscall distress*, dan *legislature size* bernilai 0, maka total manipulasi akrual untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebesar Rp 1,021 triliun.
2. Koefisien regresi *government size* bernilai negatif sebesar -18,620,000,000 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel *government size* akan mengurangi manipulasi akrual sebesar Rp 18,62 miliar. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H₁) “*Government size* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah” **ditolak**. Meskipun mampu mengurangi manipulasi akrual, pengaruh *government size* ini dianggap tidak signifikan (*p-value* (signifikansi) = 0,553 > 0,05).

3. Koefisien regresi kapasitas fiskal bernilai positif sebesar 0,052 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan kapasitas fiskal maka akan meningkatkan manipulasi akrual sebesar Rp 0,052 miliar (Rp 52 juta). Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) “Kapasitas fiskal berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah” **ditolak**. Meskipun meningkatkan potensi bertambahnya manipulasi akrual, pengaruh kapasitas fiskal ini dianggap tidak signifikan ($p\text{-value}$ (signifikansi) = 0,174 > 0,05).
4. Koefisien regresi *fiscal distress* bernilai positif sebesar 0,259 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan *fiscal distress* akan meningkatkan manipulasi akrual sebesar Rp 0,259 miliar (Rp 259 juta). Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) “*Fiscal distress* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah” **diterima**. Kemampuan *fiscal distress* ini dianggap signifikan dalam meningkatkan praktik manipulasi akrual ($p\text{-value}$ (signifikansi) = 0,002 < 0,05).
5. Koefisien regresi *legislature size* bernilai negatif sebesar 13,220,000,000 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan *legislature size* akan mengurangi manipulasi akrual sebesar Rp 13,22 miliar. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) “*Legislature size* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah” **diterima**. Kemampuan *legislature size* untuk mengurangi manipulasi akrual ini dianggap signifikan ($p\text{-value}$ (signifikansi) = < 0,001 < 0,05).

4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 Pengaruh *government size* terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi *government size* bernilai negatif sebesar -18,620,000,000 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel *government size* akan mengurangi manipulasi akrual sebesar Rp 18,62 miliar. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) “*Government size* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah” **ditolak**. Meskipun mampu mengurangi manipulasi akrual, pengaruh *government size* ini dianggap tidak signifikan ($p\text{-value}$ (signifikansi) = $0,553 > 0,05$). Hasil penelitian ini sejalan dengan Handayani et al. (2022), Adnan et al. (2023) serta Uttunggadewi et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa *government size* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual.

Kirana et al. (2024) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka akan semakin kecil tingkat manipulasi akrualnya. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang lebih besar memiliki beban tugas yang kompleks sehingga semakin meningkatnya pelayanan dan aset yang dikelola akan besar dan begitu juga dengan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Sehingga baik pemerintah pusat maupun masyarakat akan memberikan spotlight yang lebih terhadap pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang lebih besar, Artinya, *government size* yang lebih besar dapat menyebabkan kompleksitas dan tantangan dalam pengawasan. Handayani et al. (2022) juga menjelaskan bahwa Pemda yang lebih besar memiliki beban tugas yang lebih kompleks karena

semakin penduduk yang dilayani dan aset yang dikelola juga lebih besar. Biasanya, kebijakan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah mendapat perhatian lebih besar dari Pusat, dan masyarakat, serta secara politik mendapat pengawasan lebih cermat dari legislatif.

Dalam kajian teori agensi, terdapat hubungan antara *principal* (masyarakat atau otoritas pengawas) dan *agent* (pemerintah daerah) di mana agent bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaporkan hasilnya kepada *principal*. Konflik kepentingan dan asimetri informasi sering terjadi karena agent memiliki informasi lebih banyak dan dapat memiliki insentif untuk melakukan manipulasi laporan keuangan demi memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Namun, hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah (*government size*) semakin besar, biasanya diikuti dengan peningkatan pengawasan, baik dari internal maupun eksternal, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Pemerintah daerah yang besar cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan menjadi sorotan lebih banyak pihak, sehingga peluang dan insentif untuk melakukan manipulasi akrual menjadi lebih kecil.

4.3.2 Pengaruh kapasitas fiskal terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi kapasitas fiskal bernilai positif sebesar 0,052 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan kapasitas fiskal maka akan meningkatkan manipulasi akrual sebesar Rp 0,052 miliar (Rp 52 juta). Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2)

“Kapasitas fiskal berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah” **ditolak**. Meskipun meningkatkan potensi bertambahnya manipulasi akrual, pengaruh kapasitas fiskal ini dianggap tidak signifikan ($p\text{-value}$ (signifikansi) = $0,174 > 0,05$). Hasil penelitian ini sejalan dengan Kirana et al. (2024) yang dalam *path coefficient* penelitiannya menemukan bahwa kapasitas fiskal berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual. Febrianti (2022) menjelaskan bahwa ketika sebuah pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang rendah maka akan mencerminkan keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dan infrastruktur yang memadai, sehingga pemerintah daerah cenderung menggunakan manipulasi akrual sebagai diskresi untuk melaporkan kinerja keuangan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan anggaran, terutama untuk menghindari defisit.

Penjelasan di atas juga memiliki relevansi dengan Adnan et al. (2023), Uttunggadewi et al. (2024), serta Putri et al. (2023) yang mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan lebih leluasa tanpa harus melakukan manipulasi akrual karena kemampuan fiskal yang kuat mengurangi tekanan untuk memanipulasi laporan keuangan demi memenuhi ekspektasi publik atau pemerintah pusat. Namun dalam kajian teori agensi, kapasitas fiskal justru dapat berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual. Hal ini terjadi karena peningkatan kapasitas fiskal memberikan peluang bagi agen (pemerintah daerah) untuk menggunakan kebijakan akrual secara diskresioner demi kepentingan mereka sendiri, seperti menutupi kekurangan anggaran atau memperbaiki citra kinerja

keuangan. Dengan kata lain, agen yang memiliki kapasitas fiskal tinggi mungkin terdorong untuk melakukan manipulasi akrual guna memenuhi ekspektasi principal (pemangku kepentingan) atau untuk mengamankan sumber daya lebih besar di masa depan. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, di mana agen memanfaatkan keleluasaan fiskal untuk melakukan tindakan oportunistik melalui manipulasi akrual (Handayani et al., 2022).

4.3.3 Pengaruh *fiscal distress* terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi *fiscal distress* bernilai positif sebesar 0,259 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan *fiscal distress* akan meningkatkan manipulasi akrual sebesar Rp 0,259 miliar (Rp 259 juta). Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) “*Fiscal distress* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah” **diterima**. Kemampuan *fiscal distress* ini dianggap signifikan dalam meningkatkan praktik manipulasi akrual ($p\text{-value (signifikansi)} = 0,002 < 0,05$). Hasil ini mendukung penelitian, Tampubolon et al. (2023) serta Uttunggadewi et al. (2024) menemukan adanya pengaruh positif yang diberikan terhadap manipulasi akrual.

Tampubolon et al. (2023) menjelaskan bahwa Ketika pemerintah daerah mengalami *fiscal distress* atau kesulitan keuangan, terdapat tekanan yang lebih besar bagi manajer atau pejabat pemerintah untuk memperbaiki citra kinerja keuangan melalui pelaporan keuangan. Kondisi ini menciptakan konflik kepentingan antara prinsipal (misalnya, masyarakat atau pemerintah pusat sebagai

pemberi dana) dan agen (pemerintah daerah) yang berusaha melindungi kepentingan pribadi atau mempertahankan posisi mereka. Untuk mengurangi persepsi negatif akibat kondisi fiskal yang buruk, agen cenderung menggunakan kebijakan diskresi akrual secara lebih agresif untuk memanipulasi laporan keuangan sehingga tampak lebih baik dari kondisi sebenarnya. Dengan kata lain, fiscal distress meningkatkan insentif bagi agen untuk melakukan manipulasi akrual guna menyembunyikan masalah keuangan dan menjaga kepercayaan publik serta legitimasi pemerintah daerah (Tampubolon et al., 2023).

4.3.4 Pengaruh *legislature size* terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi *legislature size* bernilai negatif sebesar 13,220,000,000 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan *legislature size* akan mengurangi manipulasi akrual sebesar Rp 13,22 miliar. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) “*Legislature size* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual dalam laporan keuangan daerah” **diterima**. Kemampuan *legislature size* untuk mengurangi manipulasi akrual ini dianggap signifikan ($p\text{-value}$ (signifikansi) = $< 0,001 < 0,05$). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Prayuda & Arifin (2024) yang menjelaskan bahwa semakin besar ukuran legislatif, diharapkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin ketat sehingga dapat mengurangi peluang manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan. Hasil ini juga didukung oleh Handayani et al. (2022) bahwa *legislature size* yang lebih besar memperkuat mekanisme pengawasan internal yang efektif, mengurangi konflik kepentingan antara

prinsipal (masyarakat/legislatif) dan agen (eksekutif), sehingga menekan praktik manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Namun sejatinya ukuran legislatif yang besar bukanlah jaminan pengawasan yang mutlak baik secara praktis. Teori agensi menyatakan bahwa semakin banyak jumlah agen (legislator), semakin besar risiko koordinasi dan konflik kepentingan. Ukuran legislatif yang besar bisa mengakibatkan fragmentasi politik, tarik menarik kepentingan, atau bahkan kolusi antara legislatif dan eksekutif. Dalam skenario ini, legislatif yang besar justru tidak efektif dalam pengawasan, dan malah membuka peluang bagi manipulasi akrual karena kontrol menjadi lemah atau mudah dinegosiasikan secara politis. Hal ini relevan dengan penjelasan Evelindasari (2020) bahwa dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia, efektivitas DPRD sebagai pengawas keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kapasitas anggotanya, afiliasi politik, kepentingan elektoral, dan integritas. Penjelasan tersebut mencerminkan mekanisme monitoring yang tidak selalu optimal, sehingga peran ukuran legislatif harus dilihat secara hati-hati terhadap konteks manipulasi akrual.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh *government size*, kapasitas fiskal, *fiscal distress*, dan *legislature size* terhadap manipulasi akrual pada pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. *Government size* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual, artinya semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin kecil kecenderungan untuk melakukan manipulasi akrual. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya aset dan kompleksitas tugas pada pemerintah daerah yang besar mendorong pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak sehingga menekan peluang manipulasi.
2. Kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual, namun pengaruhnya juga tidak signifikan. Artinya, peningkatan kapasitas fiskal cenderung meningkatkan peluang manipulasi akrual, meskipun secara statistik belum terbukti kuat. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal tinggi memiliki keleluasaan lebih besar untuk melakukan diskresi dalam pelaporan keuangan.
3. *Fiscal distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manipulasi akrual. Ketika pemerintah daerah mengalami tekanan keuangan, insentif untuk memanipulasi laporan keuangan menjadi lebih tinggi guna memperbaiki citra keuangan dan menjaga legitimasi di mata publik maupun pemerintah pusat.

4. *Legislature size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manipulasi akrual. Semakin besar jumlah anggota legislatif, semakin ketat pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga peluang terjadinya manipulasi akrual dapat ditekan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan.

1. Pemerintah pusat dan lembaga pengawas seperti BPK perlu meningkatkan pengawasan pada pemerintah daerah yang berukuran kecil, karena mereka cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan manipulasi akrual akibat pengawasan yang lebih longgar.
2. Pemerintah daerah, terutama yang memiliki kapasitas fiskal tinggi, perlu memperkuat sistem pengendalian internal agar penggunaan diskresi dalam pelaporan keuangan tidak disalahgunakan untuk tujuan manipulatif.
3. Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya *fiscal distress*, agar tidak terdorong melakukan manipulasi akrual sebagai solusi jangka pendek atas masalah keuangan.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendorong optimalisasi peran legislatif dalam pengawasan keuangan daerah, termasuk meningkatkan kapasitas dan integritas anggota legislatif agar fungsi pengawasan berjalan efektif dan independen.

5. Seluruh pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta membuka akses informasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pencegahan manipulasi akrual.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Abdullah, S., & Kamal, M. (2023). Accrual Management in the Local Government Of Aceh: An Empirical Evidence. *Journal of Accounting Research, Organization, and Economics*, 6, 63–72.
- Anessi-Pessina, E., & Sicilia, M. (2019). Do Top Managers' Individual Characteristics Affect Accounting Manipulation in the Public Sector? *Journal of Public Administration Research And Theory*, 1–20.
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *EKSIS*, XI(1), 87–101.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2023, May 23). *BPK Temukan Beberapa Permasalahan pada LK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022*. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-temukan-beberapa-permasalahan-pada-lk-provinsi-jawa-tengah-tahun-2022>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024*.
- Baskaran, T., & Bigsten, A. (2013). Fiscal Capacity and the Quality of Government in Sub-Saharan Africa. *World Development*, 45, 92–107.
- Bradbury, J. C., & Stephenson, E. F. (2003). Local government structure and public expenditures. *Public Choice*, 115, 185–198.
- Cohen, S., Bisogno, M., & Malkogianni, I. (2019). Earnings management in local governments: the role of political factors. *Journal of Applied Accounting Research*, 20(03), 331–348.
- Evelindasari, L. A. (2020). *Pengaruh Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Belanja Modal, dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014-2018*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Febrianti, E. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 629–637.
- Gamayuni, R. R. (2022). Motivation And Abnormal Accrual Characteristics on Financial Statements of Local Governments in Indonesia. *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt*, 19(2), 969–991.
- Handayani, Darwanis, & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi Akrua dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 275–291.

- Junita, A., Abubakar, E., & Abdullah, S. (2018). The Effect of Budget Variances on the Local Government Budget Changes with Legislature Size as Moderator. *Academic Journal of Economic Studies*, 4(1), 162–173.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). *Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Koridor Wilayah Jawa*. [Http://Appejawa.Navperencanaan.Com/Peta/Viewmap?Prov_code=jateng](http://Appejawa.Navperencanaan.Com/Peta/Viewmap?Prov_code=jateng).
- Kirana, S., Martini, R., & Aryani, Y. A. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manipulasi Akrua. *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(02), 1915–2065.
- Kloha, P., Weissert, C. S., & Kleine, R. (2005). Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress. *Public Administration Review*, 65(3), 313–323.
- Martinez-Vazquez, J., & Boex, L. F. J. (1997). New England Public Policy Center at the Federal Reserve Bank of Boston. *International Studies Program*, 97(3), 1–23.
- Nagowski, M. P. (2007). The fiscal capacity of New England. *New England Public Policy Center at the Federal Reserve Bank of Boston*, 07(4), 1–4.
- Olivian, G. R., & Wahidahwati, E. (2021). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Auditor terhadap Manipulasi Aktivitas Riil. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7), 1–20.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Sejarah*. [Http://Jatengprov.Go.Id/Sejarah/](http://Jatengprov.Go.Id/Sejarah/).
- Pilcher, R. (2011). Local governmental management of discretionary and specific accruals. *Int. J. Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 7(1/2), 32–57.
- Pina, V., Areas, M. J., & Marti, C. (2012). Accruals and “accounting numbers management” in UK executive agencies. *Public Money and Management*, 32(4), 273–280.
- PKP Jawa Tengah. (2020). *Gambaran Umum Wilayah Jawa Tengah*. [Https://Perkim.Id/Profil-Pkp/Profil-Provinsi/Profil-Perumahan-Dan-Kawasan-Permukiman-Provinsi-Jawa-Tengah/](https://Perkim.Id/Profil-Pkp/Profil-Provinsi/Profil-Perumahan-Dan-Kawasan-Permukiman-Provinsi-Jawa-Tengah/).
- Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah. (2018, June 9). *Akhirnya, Pemkab Tegal Terima Opini WTP BPK RI*. [Https://Jatengprov.Go.Id/Beritadaerah/Akhirnya-Pemkab-Tegal-Terima-Opin-Wtp-Bpk-Ri/](https://Jatengprov.Go.Id/Beritadaerah/Akhirnya-Pemkab-Tegal-Terima-Opin-Wtp-Bpk-Ri/).

- Pradana, I., & Sarjiyanto. (2023). Financial Distress Ditinjau dari Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(5), 978–985.
- Prayuda, Y. W., & Arifin, J. (2024). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 6, 77–87.
- Putri, M., Abdullah, S., Adnan, & Yusmita, F. (2023). Manipulasi Akrua dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Apakah Government Size dan Kapasitas Fiska Memiliki Efek? *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 8(4), 536–544.
- Qiao, M., Ding, S., & Liu, Y. (2019). Fiscal decentralization and government size: The role of democracy. *European Journal of Political Economy*, 59, 316–330.
- Ricciuti, R. (2004). Political fragmentation and fiscal outcomes. *Public Choice*, 118, 365–388.
- Rohman, A. (2016). Analisis Kebijakan Diskresi Akrua terhadap Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 10(01), 1–24.
- Rosalina, E., Frima, R., & Maysanti, Y. (2022). Faktor Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Sebagai Prediktor dari Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. *Proceeding Applied Business and Engineering Conference*, 73–79.
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan, dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM FEKON*, 679(692), 3–1.
- Sari, N. M. D. P. S., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8), 4759–4787.
- Shafira, C. A., & Abdullah, S. (2022). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Financial Distress terhadap Manipulasi Akrua pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(3), 348–358.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Tampubolon, L., Dewata, E., Indriasari, D., & Jauhari, H. (2023). Pengaruh Government Size, Fiscal Distress, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Manipulasi Akrua. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 21(2), 104–118.

- Thusa'dia, N. H., Maria, & Dwitayanti, Y. (2025). Pengaruh Ukuran Pemerintah dan Kapasitas Fiskal Terhadap Diskresi Akrua. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(3), 642–653.
- Uttunggadewi, S. K. M., Martini, R., & Aryani, Y. A. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manipulasi Akrua: Studi pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* ., 12(02), 1915–2065.

